KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sidang Tahunan Lebih Sederhana
Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Sidang Tahunan Lebih Sederhana

Sidang Tahunan MPR yang berlangsung hari ini akan dipersingkat. Sore hari, Presiden Jokowi akan membacakan nota keuangan pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah pandemi Covid-19, Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan diselenggarakan pada hari Jumat (14/8/2020) didesain lebih sederhana dan dipercepat. Sidang juga akan berlangsung dalam protokol kesehatan Covid-19 yang ketat dan minim kehadiran fisik peserta ataupun undangan.

Peserta sidang tanpa terkecuali wajib menjalani tes usap Covid-19. Selain itu, sidang digelar dalam kombinasi virtual dan fisik.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar saat dihubungi, Kamis (13/8), mengatakan, penyelenggaraan sidang tahunan kali ini sedikit berbeda karena situasi pandemi Covid-19.

"Sidang digelar dengan cara yang lebih sederhana mengingat *concern* dan keprihatinan kita terhadap protokol kesehatan," kata Indra.

Menurut dia, sidang tahunan berlangsung pukul 09.00 hingga 10.45. Sidang tahunan akan dibuka Ketua MPR Bambang Soesatyo dan ditutup Ketua DPR Puan Maharani.

Sidang didahului dengan pidato dari Ketua MPR. Setelah itu, kepemimpinan sidang diserahkan kepada Ketua DPR untuk meneruskan sidang bersama DPR dan DPD. Dalam sidang bersama DPR dan DPD, Presiden dipersilakan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-75 RI. Presiden juga akan menyampaikan ringkasan laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara.

Kemudian siang harinya, pukul 14.00, sidang dilanjutkan dengan pembacaan nota keuangan pemerintah dalam rangka RUU APBN 2021 oleh Presiden. Dalam sidang kedua ini, Ketua DPR juga sekaligus akan membuka masa sidang DPR.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Sidang Tahunan MPR tidak digelar bersamaan dengan sidang DPR dan DPD. Lazimnya sidang tahunan dipimpin Ketua MPR dan ditutup juga oleh Ketua MPR. Sidang tahunan biasanya diawali pidato Ketua MPR, setelahnya dilanjutkan dengan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, dan pidato pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, sidang ditutup.

Selain itu, perbedaan lain, seperti disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo, pada Sidang Tahunan MPR kali ini, lembaga negara akan menyerahkan laporan kinerja lembaga kepada pimpinan MPR. Selanjutnya, laporan kinerja tersebut akan dipublikasikan secara daring oleh MPR.

"Sebenarnya pimpinan MPR RI telah sepakat, pada Sidang Tahunan MPR RI kali ini, pimpinan lembaga negara dapat menyampaikan laporan kinerjanya langsung kepada masyarakat. Tetapi, karena pandemi Covid-19, hal tersebut belum bisa dilaksanakan," tutur Bambang.

Kehadiran fisik

Menurut Indra, kehadiran fisik akan sangat dibatasi dalam sidang tahunan. Dari 575 anggota DPR/MPR, hanya 176 orang yang akan hadir. Sementara dari 136 anggota DPD/MPR, hanya 50 orang yang hadir. Tidak ada undangan kehadiran secara fisik bagi duta besar negara sahabat sehingga mereka bisa mengikuti sidang secara virtual.

"Anggota yang tidak hadir secara fisik diundang untuk mengikuti sidang secara virtual. Demikian pula untuk mantan presiden dan wakil presiden. Menteri yang hadir hanya menteri koordinator," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sidang tahunan yang lebih sederhana, singkat, serta merupakan kombinasi antara virtual dan fisik itu terpaksa dilakukan karena pandemi Covid-19 belum menunjukkan tren penurunan.

Tanda kehormatan

Masih dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Ke-75 RI, kemarin, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 53 penerima. Para penerima terdiri dari 22 mantan pejabat negara, 7 aparatur sipil negara setingkat eselon I atau II, 2 orang dari masyarakat umum, serta 22 petugas medis yang meninggal akibat tertular Covid-19 saat sedang menjalankan tugas.

"Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Ini lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Jadi, pertimbangannya sudah matang," kata Presiden Jokowi.

Pemberian tanda kehormatan kepada mantan pejabat negara, termasuk mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, sempat memancing pro dan kontra pengguna internet di dunia maya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers virtual seusai upacara menjelaskan, yang ditetapkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah nama-nama yang diusulkan lembaga negara. Selama ini, mantan menteri dan wakil menteri serta mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara selalu diusulkan oleh lembaga negara tempat mereka mengabdi.

Pada Kamis siang, Presiden Jokowi juga mengukuhkan delapan personel Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas mengibarkan bendera Merah Putih saat upacara peringatan HUT Kemerdekaan Ke-75 RI di Istana Merdeka, 17 Agustus.

Pengukuhan dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Semua peserta pengukuhan mengenakan masker dan pelindung wajah. Jarak antara satu personel dan personel lain pun sekitar 1 meter.

Karena pandemi Covid-19, upacara peringatan detik-detik proklamasi akan diselenggarakan secara virtual. Namun, tetap ada personel yang menjalankan upacara, seperti Paskibraka. Solusinya, jumlah personel dibatasi.

Tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka terdiri atas tiga pasukan yang berjumlah 17, 8, dan 45 orang. Namun, pada tahun in, hanya tiga orang dan satu cadangan yang akan bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi. Empat personel lain bertugas pada upacara penurunan bendera.

(REK/LAS)